

Analisis *Islamic Human Development Indeks* (I-HDI) Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022

Andriani Syofyan

UIN Imam Bonjol Padang

andrianisyofyan@uinib.ac.id

Ibnu Shaleh Yahya

UIN Imam Bonjol Padang

ibnushalehyahya2000@gmail.com

Abstrak Pembangunan manusia merupakan cerminan terhadap tingkat kesejahteraan pada suatu wilayah, kualitas manusia yang baik akan menghasilkan sumber daya yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat dengan perhitungan konsep I-HDI berdasarkan pada maqashid syariah. Serta menganalisis perbandingan tingkat pembangunan manusia Human Development Indeks (HDI) dan Islamic Human Development Indeks (I-HDI) Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil perhitungan dari setiap indikator yang mencerminkan terhadap I-HDI dengan rumus yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan waktu pengamatan selama 3 tahun yaitu 2020-2022. Hasil penelitian menemukan bahwa capaian pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2020-2022 yang diukur menggunakan perhitungan I-HDI selalu mengalami peningkatan. namun, masih tergolong dalam kategori rendah, capaian ini berdasarkan indeks-indeks yang mendasari kebutuhan manusia, seperti pemeliharaan terhadap agama (*hifdzu dien*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifdzu aql*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdzu nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdzu maal*). Sedangkan hasil Pencapaian antara HDI dan I-HDI menunjukkan perbandingan yang terbalik berdasarkan maqashid syari'ah. HDI sudah berada pada kategori tinggi sedangkan I-HDI masih berada pada kategori rendah.

Kata Kunci *Islamic Human Development Indeks*

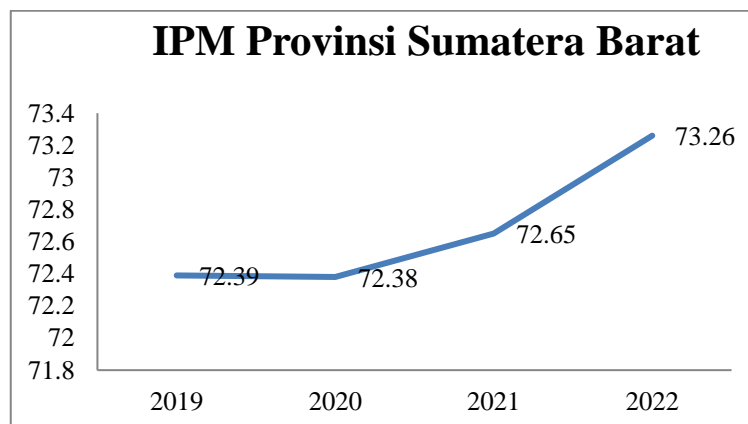
I. PENDAHULUAN

Perkembangan pada suatu pemerintahan dapat dilihat dari kualitas pembangunannya terutama pada bagian negara-negara yang sedang berkembang. Maka dari itu, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Human Development Indeks (HDI) atau disebut juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990.

United Nations Development Program (UNDP) menetapkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan

pembangunan manusia secara terukur yang dinamakan Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara khusus Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun atas tiga dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. Dimensi tersebut dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen yaitu, Angka Harapan Hidup (AHH) mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah gabungan indikator yang mengukur dimensi pengetahuan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Dilihat dari capaiannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seitiap Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat beberapa Provinsi yang mengalami penurunan, termasuk salah satunya provinsi Sumatera Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat tahun 2020 mencapai angka 72,38. Angka ini menurun sebesar 0,01 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 72,39 persen. Sementara itu pada tahun 2021-2022 kembali mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada grafik di bawah.



Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022
 Sumber: BPS.go.id, IPM, Sumatera Barat. Agustus 2023

Grafik diatas merupakan capaian IPM Provinsi Sumatera Barat selama periode 2019 – 2022. Berdasarkan pada skala nasional, pencapaian HDI dapat dikategorikan menjadi empat yaitu: kategori sangat tinggi yakni ($HDI \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq HDI \leq 80$), kategori sedang ($60 \leq HDI \leq 70$), kategori rendah ($HDI \leq 60$) (Isnaini et al., 2023). Maka dari itu HDI Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2019-2022 termasuk pada kategori tinggi.

Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 IPM Sumatera Barat mencapai 72,39. Angka ini meningkat sebesar 0,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 IPM Sumatera Barat mencapai 72,38 angka ini menurun sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini disebabkan rendahnya nilai salah satu indikator yang digunakan yaitu pengeluaran perkapita, Masyarakat Sumatera Barat memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp 10,733 juta per tahun, lebih rendah Rp. 192 ribu dibandingkan tahun sebelumnya penurunan ini akibat pengaruh dari pandemi Covid-19. Kareina pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna

mencegah penularan virus Covid-19 menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Pada tahun 2021-2022 IPM Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2022 mencapai angka 73,26 meningkat 0,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2020).

Pembangunan manusia dalam perspektif Islam tidak dapat digambarkan melalui indeks pembangunan manusia karena sifatnya yang masih general. Oleh karena itu, muncul *Islamic Human Development Index* (I-HDI) yang diperkenalkan oleh Anto sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran pembangunan manusia berdasarkan maqashid syariah. Perhitungan I-HDI menggunakan dimensi *maqashid syariah*, yang terdiri dari lima dimensi yang meliputi dimensi agama (*ad-din*), dimensi akal (*al-aql*), dimensi jiwa (*an-nafs*), dimensi kewarisan (*an-nasl*) dan dimensi kekayaan (*al-maal*). (Shikoh & Alias, 2014)

HDI digunakan sebagai salah satu alat yang dapat mengukur tingkat pembangunan manusia tidak sepenuhnya *compatible* dan sesuai untuk pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Teori dan konsepnya masih terbilang umum dan tidak didasarkan pada maqashid syariah. Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Sumatera Barat akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan *Islamic Human Development Indeks (I-HDI)*, yang mana teori serta konsep Nya berdasarkan pada perspektif Islam. Untuk itu, dalam mengukur I-HDI ditentukan oleh indikator-indikator yang dapat menentukan kondisi pembangunan manusia, indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gabungan dari peneliti sebelumnya, karena pengukuran I-HDI indikator yang digunakan belum teratur, selain itu indikator yang digunakan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di lapangan.

Perkembangan riset terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu fokus utama adalah upaya untuk menyempurnakan dan memvalidasi dimensi serta indikator yang digunakan dalam mengukur I-HDI. Penelitian oleh Shikoh dan Alias (Shikoh & Alias, 2015) dalam *Journal of Economic Cooperation and Development* serta Alias, Shikoh, dan Hamid. (Alias et al., 2017)

Selanjutnya, terdapat pula penelitian yang berfokus pada pengukuran dan perbandingan I-HDI antar negara, seperti yang dilakukan oleh Ali Khan dan Shafiai (Khan et al., 2019) dalam *Islamic Economic Studies* serta Alias, Shikoh, dan Hamid (Alias et al., 2018) dalam *International Journal of Economics and Management* yang mengukur I-HDI untuk Malaysia. Upaya integrasi I-HDI dengan konsep lain, seperti *Islamic Wealth Index*, juga dilakukan oleh Ali Khan, Shafiai, dan Rahman (Ali Khan et al., 2021) dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

Selain itu, terdapat studi kasus dan aplikasi I-HDI di berbagai wilayah, seperti yang dilakukan oleh Yurniwati, Yonnedi, dan Amin (Yurniwati et al., 2019) dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* yang mengukur I-HDI di Sumatera Barat, Indonesia. Mahmood, Malik, dan Faridi (Mahmood et al., 2020) dalam *Islamic Economic Studies* juga melakukan studi kasus I-HDI di Azad Jammu dan Kashmir. Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan dan menerapkan konsep I-HDI secara empiris.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan manusia, dalam hal ini penulis mengukur Indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat dengan menggunakan konsep *Islamic Human Development Index (I-HDI)*. Tahun pengamatan

yaitu dari tahun 2020-2022 Penelitian ini bentuk upaya untuk mengintegrasikan dimensi spiritual dan keagamaan dalam pengukuran pembangunan manusia yang seringkali diabaikan dalam indeks pembangunan konvensional. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis Islamic Human Development Indeks (I-Hdi) Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022”.

II. LANDASAN TEORI

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, *Human Development Index* (HDI) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur pencapaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak (Yektiningsih, 2018).

Islamic Human Development Indeks (I-HDI)

I-HDI adalah singkatan dari *Islamic Human Development Index* yang digunakan sebagai alat ukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Dalam merumuskan I-HDI, digunakan pedoman tujuan-tujuan syariah atau maqashid syariah sebagai indikator kebutuhan manusia baik secara material maupun spiritual. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (meincapai *falah*). Menurut al-Syatibi, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*) keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar diatas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna (Junaedi & Arsyad, 2022).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai sumber seperti laporan, jurnal dan BPS (Badan Pusat Statistik). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa data time series dan terdapat 24 data dalam penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan waktu pengamatan yaitu tahun 2020 hingga 2022 dan objek penelitiannya yaitu 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan indikator dari *Islamic Human Development Indeks* (I-HDI) yaitu sebagai berikut: 1) Angka kriminalitas; 2) Angka Harapan Hidup; 3) Rata-rata Lama Sekolah; 4) Angka Harapan Lama Sekolah; 5) Angka Kelahiran Total dan Kematian Bayi; 6) Pengeluaran Perkapita; 7) Indeks Gini dan Kedalaman Kemiskinan. Adapun metode penghitungan *Islamic Human Development Indeks* (I-HDI) menggunakan rumus sebagai berikut:

Indeks Ad-Dien / ID

Indeks Ad-Dien akan diwakili oleh indikator data Indeks Kriminalitas (Crime Index) Provinsi Sumatera Barat, dengan rumus :

$$\text{Indeks Kriminalitas} = \frac{\text{Actual Crime} - \text{Minimal Crime}}{\text{Maximal Crime} - \text{Minimal Crime}}$$

Dimana :

Actual Crime = Nilai aktual Kriminalitas tahun ke i

Min Crime = Nilai aktual Kriminalitas terendah tahun ke i

Max Crime = Nilai aktual Kriminalitas tertinggi tahun ke ii

Indeks An-Nafs / INF

Indeks An-Nafs / INF dicari dengan memakai data tingkat harapan hidup (Life Expectancy Index) Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan rumus:

$$\text{INF} = \frac{\text{Actual Crime} - 20}{85 - 20}$$

Dimana :

INF = Indeks An-Nafs

Aktual Life Expectancy = Tingkat Harapan Hidup tahun ke i

20 = Tingkat Harapan Hidup Minimal sesuai standar UNDP

85 = Tingkat Harapan Hidup Maksimal sesuai standar UNDP

Indeks Al-'Aql / IA

Indeks Al-Aql / IA atau Harapan lama sekolah (EYS) dan Rata-rata lama sekolah (Means Years of Schooling Index/MYSI) Provinsi Sumatera Barat dengan rumus:

$$\text{Eys} = \frac{\text{Actual Eys} - 0}{18 - 0}$$

$$\text{MYSI} = \frac{\text{Actual MYSI} - 0}{15 - 0}$$

$$\text{(IA)} = 1/2 \text{ (Eys)} + 1/2 \text{ (MYSI)}$$

Dimana :

IA = Indeks Al-'Aql

Eys = Literacy Index / Angka Harapan Lama Sekolah

Actual Eys = nilai aktual tahun ke i

0 = nilai minimal Eys sesuai standar UNDP

18 = nilai maksimal Eys sesuai standar UNDP

MYSI = Means Years of Schooling / Indeks rata-rata lama sekolah.

Actual MYSI = nilai aktual tahun ke i

0 = nilai minimum Mysi sesuai standar UNDP

15 = nilai maksimum Mysi sesuai standar UNDP

Indeks An-Nasl / INS

Indeks An-Nasl ini memakai data angka kelahiran total (FI) dan angka kematian bayi (MI) dengan rumus:

$$\text{FI} = \frac{\text{Actual Fr} - \text{Minimal Fr}}{\text{Maksimal Fr} - \text{Minimal Fr}}$$

$$\text{MI} = \frac{\text{Actual Mr} - \text{Minimal Mr}}{\text{Maximal Mr} - \text{Minimal MR}}$$

$$\text{(INS)} = 1/2 \text{ (FI)} + 1/2 \text{ (MI)}$$

Indeks Al-Maal / IM

Index Al-Maal / AM memakai data koefisien pengeluaran perkapita disesuaikan (PP), Indeks Gini (Gi) kedalaman kemiskinan (IKK) dengan rumus:

$$\text{DEI} = 1/2 \text{ (GcI)} + \text{P1}$$

$$PPI = (\text{Actual PP}-1,007436)/(26,572352-1,007436)$$

$$(IM) = 1/2 (DEI + PPI)$$

Dimana:

Actual PP = Pengeluaran perkapita tahun ke i

1,007436 = Nilai minimal pengeluaran per kapita standar UNDP

26,572352 = Nilai maksimum pengeluaran per kapita standar UNDP

Dengan diketahuinya rumus pembentuk I-HDI, maka dapat ditarik rumus Islamic Human Development Index (I-HDI) sebagai berikut:

$$I-HDI = (2/5 (ID) + 1/5 (INF + IA + INS + IM) \times 100$$

IV. HASIL PENELITIAN

Penghitungan I-HDI Provinsi Sumatera Barat

Adapun hasil penghitungan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penghitungan I-HDI Provinsi Sumatera Barat

Indeks	2020	2021	2022
Hifdz Dien (ID)	3,15	4,92	4,67
Hifdz Nafs (INF)	0,761076923	0,762923070	0,767692308
Hifdz 'Aql (IA)	0,689111111	0,693722222	0,697666667
Hifdz 'Nasl (INS)	0,331157464	0,331157464	0,331157464
Hifdz Maal (IM)	0,387567439	0,436265662	0,436497812
I-HDI	44,63840495	46,45074803	46,529283

Analisis Hasil Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2020-2022 seirta pada semua indikator yang digunakan mengalami tren peningkatan. Namun, secara keseluruhan pembangunan manusia yang berdasarkan perspektif Islam di Sumatera Barat menurut rasio peningkatan *United Nations Development Programme* (UNDP) masih berada dalam kategori rendah.

Pada tahun 2020 yaitu, berada di angka sebesar 44,63. Artinya dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa capaian dari semua indikator komponen pembentukan I-HDI yang mencerminkan dimensi *hifdz din*, *hifdz nasl*, *hifdz aql*, *hifdz nasl*, dan *hifdz maal* masih relatif rendah. Angka ini berdasarkan hasil perhitungan pada semua indikator yang digunakan. Komponen yang paling rendah yaitu pada *dimensi hifdz nasl* atau memelihara keturunan yaitu, sebesar 0,3311 dimensi ini mencerminkan pada tingkat kesehatan di Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan indikator angka kelahiran dan kematian bayi. Hal tersebut disebabkan karena angka kelahiran yang telah disesuaikan dengan persentase angka kematian berada pada tingkat terindah. Maka dari itu kecilnya angka dari indeks *an-nasl* berpengaruh pada tingkat pembangunan manusia di Provinsi Sumbar pada status pembangunan rendah.

Berdasarkan penjelasan yang Anda berikan, rendahnya capaian pada dimensi *hifdz nasl* atau memelihara keturunan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di Provinsi Sumatera Barat masih relatif rendah. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada hal tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, angka kelahiran yang disesuaikan dengan persentase angka kematian bayi yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam kesehatan ibu dan anak serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Seperti yang disebutkan dalam artikel "Measuring Islamic Human Development Index in West Sumatra, Indonesia" oleh Yurniwati, Efa Yonnedi, dan Zulkarnaini Amin (Yurniwati et al., 2019) indikator ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Kedua, faktor-faktor sosial budaya dan ekonomi juga dapat mempengaruhi angka kelahiran dan kematian bayi. Kondisi kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dapat menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak (Emrie & Suparmi, 2020). *Ketiga*, infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang belum memadai di beberapa wilayah pedesaan atau terpencil di Sumatera Barat dapat menjadi hambatan dalam menjangkau layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi ibu hamil dan bayi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, serta mengembangkan infrastruktur pendukung di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Dengan demikian, dimensi *hifdz nasl* dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan capaian I-HDI di Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2021 capaian I-HDI masih berada pada kategori rendah yaitu diangkat sebesar 46,45. Namun angka ini meningkat 1,82 dari tahun sebelumnya yaitu 48,10 pada tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel 4.8 Peningkatan ini disebabkan tingginya peningkatan dari salah satu komponen I-HDI yaitu pada *hifdz maal* yang mencerminkan penajagaan terhadap harta menggunakan indikator pengeluaran per kapita, gini rasio, dan kedalaman kemiskinan. Selepas dari pandemi Covid-19 pada tahun 2021 aktivitas manusia dari segi perekonomian sudah kembali mengalami perubahan pendapatan dan daya beli masyarakat sudah kembali stabil sehingga meningkatnya angka pengeluaran per kapita di Provinsi Sumatera Barat (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021).

Pada tahun 2022 pencapaian I-HDI di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong pada kategori rendah yaitu sebesar 46,52 capaian ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun peningkatannya cukup kecil yaitu, hanya meningkat sebesar 0,7 dari tahun sebelumnya yaitu 46,45 pada tahun 2021. Peningkatan ini masih terlalu kecil namun sudah menunjukkan hal yang positif terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas peningkatan ini juga dipengaruhi oleh angka peningkatan pada salah satu komponen I-HDI yaitu *hifdz maal* yang mencerminkan pemeliharaan terhadap harta yang menggunakan indikator pengeluaran per kapita, indeks gini, dan kedalaman kemiskinan. Peningkatan komponen-komponen I-HDI tahun 2020-2022 sudah menunjukkan hal yang positif terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat namun masih berada di angka yang relatif rendah dari beberapa komponen. Sehingga, belum mencapai tujuan pembangunan dari *maqashid syariah* yang mana menurut Imam Al-Syatibi tingkat kesejahteraan terletak pada penajagaan terhadap agama (*hifdz dien*), penajagaan terhadap jiwa (*hifdz nafs*), penajagaan terhadap akal (*hifdz aql*), penajagaan terhadap keturunan (*hifdz nasl*), dan penajagaan terhadap harta (*hifdz maal*).

Analisis Hasil Hipotesis Kedua

Selama periode 2020-2022 terjadi peningkatan dalam hasil perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dalam perspektif Islam (I-HDI) Provinsi Sumatera Barat,

meskipun masih berada dalam kategori rendah. I-HDI digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dan penggunaan *maqashid syariah* sebagai landasan memberikan nilai tambah dari perspektif keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa peningkatan I-HDI selama periode tersebut mencerminkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai *maqashid syariah*.

Dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dalam mengukur pembangunan manusia melalui I-HDI, perhatian diberikan pada aspek keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat secara holistik. *Maqashid syariah* menekankan perlunya memelihara dan mencapai tujuan-tujuan yang mendasari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai landasan utama dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan sosial. Oleh karena itu, peningkatan I-HDI selama periode tersebut mencerminkan usaha untuk mencapai tujuan-tujuan ini melalui pembangunan yang berfokus pada keadilan dan kemaslahatan umum. Meskipun terjadi peningkatan I-HDI, Provinsi Sumatera Barat masih berada dalam kategori rendah. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan memperhatikan nilai-nilai *maqashid syariah* sudah tercapai tetapi juga masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Guna mempertahankan capaian pembangunan manusia serta penyusunan kebijakan dan program-program yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan I-HDI dan mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Sedangkan berdasarkan hasil capaian *Human Development Index* (HDI) Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2022, terlihat bahwa pencapaian HDI didominasi oleh kategori Tinggi. Pada tahun 2020, di Provinsi Sumatera Barat mencapai nilai sebesar 72,38, yang menempatkannya dalam kategori HDI tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di wilayah tersebut telah mencapai tingkat yang memadai, dengan kualitas hidup masyarakat berada pada posisi yang relatif baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Peningkatan nilai HDI Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun, khususnya dari 72,38 pada tahun 2020 menjadi 72,65 pada tahun 2021, menunjukkan adanya progress pembangunan manusia yang signifikan selama periode tersebut.

Hal ini dapat dicermati dari peningkatan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Peningkatan angka harapan hidup, peningkatan rata-rata lama sekolah, dan peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan, perlu diperhatikan bahwa HDI Provinsi Sumatera Barat masih berada dalam kategori Tinggi dan belum mencapai nilai maksimum 1. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk terus meningkatkan pembangunan manusia dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan serta ketimpangan yang ada di berbagai sektor, seperti kesehatan dan pendidikan, untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Pembahasan

Hifdz Dien (Pemeliharaan Terhadap Agama)

Dimensi ini indikator yang digunakan yang mencerminkan terhadap pemeliharaan terhadap agama yaitu angka kriminalitas. Kriminalitas merupakan suatu tindak kejahatan

yang dilakukan secara sengaja dalam keadaan sadar dan mengetahui dengan baik akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (Rahmalia et al., 2019).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat kejahatan tahun 2020 yaitu sebesar 9.128 tindak kejahatan. Pada tahun 2021 turun menjadi 6.169 tindak kejahatan, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 7.003 tindak kejahatan. Angka kejahatan tertinggi berada di Kota Padang. Menurut Badan Pusat Statistik, hal ini dikarenakan padatnya penduduk di wilayah tersebut sehingga menimbulkan kesempatan mengambil hak orang lain semakin lebar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan masih sering terjadi pemeliharaan seseorang terhadap agama belum sepenuhnya terwujud.

Penelitian yang dilakukan (Bahsoan, 2011) menjelaskan bahwa cerminan terhadap *hifdz dien* salah satunya adalah pelaksanaan ibadah penting dalam Islam yaitu shalat. Shalat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam karena shalat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga korelasinya adalah semakin tinggi angka kriminalitas terjadi, maka dapat dilihat tingkat kualitas ibadah seseorang terutama shalat terbilang masih rendah.

Hifdz Nafs (Pemeliharaan Terhadap Jiwa)

Selama periode tahun 2020 hingga 2022, angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 69,47. Selanjutnya, terjadi peningkatan angka harapan hidup pada tahun 2020 menjadi 69,50, dan terus meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 69,90. Peningkatan yang terjadi pada angka harapan hidup ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kualitas hidup penduduk di Provinsi Sumatera Barat. upaya dalam meningkatkan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat sudah lebih baik dan dari data juga didapatkan bahwa angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Kesimpulannya bahwa telah terwujudnya *hifdz nafs* (memelihara jiwa) tujuan dari *maqashid syariah* yang dijelaskan oleh penelitian bahsoan 2011 dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat memelihara jiwa untuk hidup secara terhormat dan agar terhindar dari tindakan penganiayaan dan konsumsi makan yang berlebihan.

Hifdz Nasl (Pemeliharaan Terhadap Keturunan)

Hifdz nasl merupakan konsep yang mendasar dalam *maqashid syariah* yang mencakup usaha untuk merawat dan melindungi kelangsungan garis keturunan. Prinsip ini memiliki peran yang sangat penting dalam konteks penerapan nilai-nilai syariat. Salah satu aspek vital dalam menjaga keberlanjutan kehidupan manusia adalah dengan menjaga dan merawat keturunan serta keluarga mereka. Dalam rangka mengukur efektivitas *hifdz nasl*, diciptakan sebuah angka indeks *nasl* yang memanfaatkan indikator-indikator yang mencerminkan dimensi *hifdz nasl* itu sendiri. Indeks *nasl* ini membantu mengukur sejauh mana upaya dalam melestarikan keturunan telah dilakukan. Salah satu contoh indikator yang digunakan adalah data mengenai angka kelahiran total dan kematian bayi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, data pada tahun *Long Form* sensus penduduk 2020 pada tahun 2022 mencatat angka kelahiran total sebesar 2,46 yang artinya hanya sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.

Kesimpulannya adalah tingginya pertumbuhan penduduk dan dapat menghambat upaya-upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini mencerminkan *hifdz nasl* yang menggunakan indikator angka kelahiran total dalam

mengukur indeks kesehatan masyarakat bernilai negatif, sehingga dapat mengakibatkan penurunan pembangunan manusia. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk dalam konteks pembangunan Provinsi Sumatera Barat memiliki korelasi yang erat dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yang merupakan tujuan-tujuan utama hukum Islam yang mengarah pada kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. *Maqashid syariah* merupakan kerangka konseptual dalam Islam yang bertujuan untuk memelihara kepentingan dan kesejahteraan manusia. Salah satu dari tujuh tujuan utama *maqashid syariah* adalah memelihara kehidupan (*al-Hifz al-Hayāt*), yang secara langsung relevan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan harapan hidup masyarakat (Muthmainnah, 2021). Dalam konteks ini, ketika Provinsi Sumatera Barat mencantumkan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga dan memelihara kehidupan manusia. Melalui usaha meningkatkan kualitas kesehatan, seperti akses yang lebih baik terhadap layanan medis, pencegahan penyakit, dan peningkatan pola hidup sehat, Provinsi tersebut berupaya untuk mencapai kepentingan bersama (*maslahah*) penduduk.

Hifdz 'Aql (Pemeliharaan Terhadap Akal)

Hifdz 'Aql merupakan cerminan terhadap memelihara akal yang dilihat dari kualitas pendidikan seseorang yang diukur berdasarkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Provinsi Sumatera Barat mencatat pada tahun 2020-2022 angka harapan sekolah penduduk rata-rata sebesar 14,01 artinya rata-rata penduduk Sumatera Barat dari usia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan selama 14 tahun atau setingkat dengan diploma II. Kemudian rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2022 cenderung berada di angka sebesar 8,5. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8 tahun atau setingkat dengan sekolah menengah pertama. Kesimpulan kualitas pendidikan penduduk Sumatera Barat dilihat dari rata-rata lama sekolah masih tergolong rendah artinya masih banyak yang memutuskan untuk berhenti menempuh pendidikan di jenjang tingkat sekolah menengah pertama. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga menghambat pada pembangunan manusia untuk menuju manusia yang berkualitas.

Dalam Islam, akal (*'aql*) dianggap sebagai karunia Allah yang sangat penting bagi manusia. Akal memberikan kemampuan manusia untuk memahami, menganalisis, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan adanya akal, manusia dapat menjalankan tugas-tugas syariat dan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Orang yang tidak berakal atau tidak memiliki akal yang sehat tidak akan dibebani dengan tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas agama. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjaga, melindungi, dan memelihara akalnya agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Islam mengajarkan agar kita senantiasa menggunakan akal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memahami ajaran agama, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Salah satu upaya dalam memelihara akal adalah dengan menghindari hal-hal yang dapat membunuh kreativitas dan gairah kerja manusia, seperti minuman keras, narkoba, dan segala bentuk perilaku yang merusak akal dan kesehatan mental. Islam juga mengharamkan riba dan segala bentuk transaksi yang tidak adil, karena hal ini dapat merusak akal dan mengganggu keseimbangan sosial ekonomi (Rukiah et al., 2019).

Dalam ekonomi Islam, konsep memelihara akal juga tercermin dalam pandangan terhadap ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Islam mengajarkan agar setiap individu bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur dalam mencari nafkah. Kegiatan ekonomi

yang mengikuti prinsip-prinsip Islam haruslah bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan. Konsumsi yang berlebihan dan pemborosan dihindari, sehingga sumber daya dapat dikelola dengan bijaksana untuk kepentingan bersama (Rukiah et al., 2019).

***Hifdz Maal* (Pemeliharaan Terhadap Harta)**

Hifdz maal merupakan cerminan terhadap peliharaan harta indikator yang digunakan yaitu gini ratio, pengeluaran per kapita, dan indeks kedalaman kemiskinan. Pertama, rasio gini provinsi Sumatera Barat menunjukkan tahun 2020 sebesar 0,305, tahun 2021 sebesar 0,306, dan tahun 2022 sebesar 0,30. Secara kuantitatif ukuran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilihat melalui gini ratio. Pada tahun 2020 gini rasio Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,306, lebih tinggi 0,001 poin dibandingkan tahun 2021, dan gini ratio 2021 lebih tinggi 0,06 poin dibandingkan tahun 2022. Artinya ketimpangan di tahun 2022 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Kesimpulan berdasarkan capaian-capaian indeks gini 2020-2022 menemukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong rendah.

Kedua, pengeluaran per kapita pengeluaran per kapita di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020-2022, terdapat tren kenaikan pengeluaran rata-rata per individu dari tahun ke tahun. Sehingga, pada tahun 2022, pengeluaran riil perkapita mengalami kembali peningkatan menjadi Rp 11,13 juta. Artinya konsumsi rumah tangga yang dikeluarkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sudah cukup baik. Peningkatan ini akan menjadi efek positif terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks indeks *maqashid syariah*, *Hifdz Maal* mengacu pada prinsip perlindungan harta dan kekayaan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan pentingnya menjaga agar harta benda dan kekayaan didistribusikan dengan adil dan merata di antara anggota masyarakat. Jika ada ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan, hal ini dapat mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip *Hifdz Maal*.

Ketiga, indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Namun indeks kedalaman kemiskinan di Sumatera Barat masih tergolong rendah. Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan yaitu sebesar 0,92 sehingga pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,04. Artinya semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Namun pada tahun 2022 ke dalam kemiskinan Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang mana menempatkan angka sebesar 0,80. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan serta ketimpangan penduduk miskin juga semakin menyempit.

Kesimpulan dari ketiga indikator tersebut yang mencerminkan terhadap komponen I-HDI pada dimensi *hifdz maal* pemeliharaan terhadap harta di Sumatera Barat sudah cukup sesuai dengan tujuan dari *maqashid syariah*. ketimpangan distribusi pendapatan yang dilihat dari angka indeks gini rasio masih tergolong rendah. kedalaman kemiskinan yang masih tergolong rendah, dan daya beli masyarakat yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita sudah cukup tinggi Sehingga menimbulkan hal yang positif terhadap pembangunan manusia.

Menurut (Aprianto, 2017), harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya merupakan milik Allah, dimana Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga seseorang sah dalam hak milik terhadap hartanya. Dalam pandangan Islam harta memiliki kedudukan yang penting. Harta yang dimiliki

oleh manusia harus memberi kemanfaatan (*maslahah*) baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dan menghindari terjadinya kerusakan (*mafsadat*), yang dapat merugikan manusia itu sendiri (Irwan, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didukung oleh hasil penelitian Roni Arhadi (2022) dengan judul penelitian *Determinan Islamic Human Development Index* di Indonesia dimana hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa provinsi dengan pencapaian I-HDI yang didominasi pada kategori rendah termasuk salah satunya Provinsi Sumatera Barat yang juga tergolong pada kategori II-HDI rendah. Hal ini masih sama dengan hasil yang dilakukan oleh peneliti capaian I-HDI Sumatera Barat pada kategori rendah. Namun terdapat perbedaan indikator yang digunakan pada salah satu komponen I-HDI yaitu pada dimensi *hifdz nasl* sehingga mendapatkan hasil pencapaian I-HDI yang berbeda. Namun masih sama berada pada kategori II-HDI rendah. Selanjutnya didukung oleh hasil penelitian (Maulina, 2021) dengan judul *Analisis Islamic Human Development Index I-HDI di Kabupaten Bireuen* dimana hasil penelitian diketahui bahwa pencapaian pembangunan I-HDI sudah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* dalam mencapai kemaslahatan.

Perhitungan antara HDI dan I-HDI menunjukkan perbandingan yang signifikan sebaran nilai dari setiap indikator I-HDI lebih bervariasi daripada HDI serta terdapat perbedaan ukuran standar untuk status pembangun antara HDI dan I-HDI. (Shalahuddin, 2023) *Analisis APBD Perspektif Islamic Human Development Index Kota Bogor* dimana hasil penelitian diketahui bahwa anggaran kesehatan, pendidikan dan ekonomi sejalan dengan tujuan I-HDI. Yang mana anggaran pendidikan diukur dengan indeks *ad-dien* dan indeks *al-'aql*, anggaran kesehatan diukur dengan indeks *an-nafs* dan indeks *an-nasl*, anggaran ekonomi diukur dengan indeks *al-mal*. Dari hasil yang diperoleh terdapat beberapa aspek dalam eksekusi programnya belum dilakukan secara optimal sehingga berdampak pada minimnya angka I-HDI pada indeks *al-'aql* dan indeks *an-nafs*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat yang diukur menggunakan perhitungan I-HDI teori dan konsepnya berdasarkan pada pandangan Imam al-Syatibi (*maqashid syariah*), yang terdiri dari lima dimensi pemeliharaan kebutuhan dasar, yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. I-HDI di bangun dari indikator-indikator yang mencerminkan dari kelima dimensi *maqashid syariah* tersebut. Dimensi *ad-dien* diukur dengan menggunakan indikator angka kriminalitas, dimensi *an-nafs* diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup, dimensi *al-'aql* diukur dengan menggunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dimensi *an-nasl* diukur dengan menggunakan indikator angka kelahiran total dan angka kematian bayi, dan dimensi *al-maal* diukur dengan menggunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, indeks gini, dan indeks kedalaman kemiskinan. belum menunjukkan angka yang relatif tinggi dalam beberapa komponen secara persentase. Karena demikian, secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Barat masih berada pada kategori II-HDI rendah. Sehingga belum mencapai pembangunan manusia yang sesuai dengan standar *maqashid syariah*; (2) Hasil pencapaian antara HDI Dan I-HDI menunjukkan perbandingan yang terbalik. Namun keduanya mencapai kemaslahatan sesuai dengan harapan *Maqashid Syari'ah*. Selain itu, Terdapat perbedaan dalam ukuran standar untuk status pembangunan antara HDI Dan I-HDI karena menggunakan pengukuran indikator yang berbeda. Indikator pada I-HDI memasukan unsur spiritual dan material sehingga dapat menjadi lebih komprehensif dan kompatibel

dibandingkan indikator pada HDI. Sehingga, konsep standar yang diterapkan oleh HDI tidak selalu dapat digunakan oleh I-HDI dalam beberapa kasus tertentu.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap alokasi anggaran, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan memanfaatkan optimalisasi fungsi badan pemeriksa keuangan (BPK) dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Penelitian ini menemukan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat, dan terdapat perbedaan yang signifikan dalam realisasi anggaran antara kabupaten/kota di wilayah tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperbaiki pengawasan dan pengalokasian anggaran di seiktoir-sektor tersebut sangat diperlukan; (2) Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan indikator I-HDI yang lebih komprehensif guna mendapatkan hasil I-HDI yang lebih menyeluruh, mengingat I-HDI masih dalam tahap baru, diperlukan pengembangan dan penyesuaian konsep untuk mengoptimalkan penggunaannya. Bagi peneliti yang akan mengambil tema yang sama di masa depan, diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian yang dapat mempengaruhi perkembangan pada pembangunan manusia serta memperpanjang rentang waktu penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih baik dan akurat terhadap I-HDI di Provinsi Sumatera Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan dan penyelesaian

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khan, M. N. A., Shafiai, S. R. M., & Rahman, A. A. (2021). Integrating Islamic Human Development Index with Islamic Wealth Index: A Sustainable Development Approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 264–282.
- Alias, N., Shikoh, R., & Hamid, Z. (2017). Validating the Construct of Islamic Human Development Index. *Humanomics*, 33(4), 379–400.
- Alias, N., Shikoh, R., & Hamid, Z. (2018). Constructing an Islamic Human Development Index for Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 12(2), 411–429.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik.
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(1).
- BPS Provinsi Sumatera Barat. (2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019. In *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*.
- BPS Provinsi Sumatera Barat. (2021). Sumatera Barat Dalam Angka. In *Sumatera Barat Dalam Angka*.
- Emrie, S., & Suparmi, S. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Kematian Bayi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 5(1), 1–8.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2).

- Junaedi, D., & Arsyad, M. R. (2022). Tatakelola Utang dan Pembangunan Ekonomi Indonesia: Studi Komparasi Antar Rezim Pemerintahan. *Journal As-Syirkah: Islamic Economics And Financial Journal*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56672/syirkah.v1i1.6>
- Khan, A., A., M. N., & Shafiai, S. R. M. (2019). Measuring the Islamic Human Development Index (I-HDI) for OIC Countries. , 27(1). *Islamic Economic Studies*, 27(1), 87–114.
- Mahmood, K., Malik, W. S., & Faridi, M. Z. (2020). Islamic Human Development Index: A Case Study of Azad Jammu and Kashmir. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 99–120.
- Maulina, Y. (2021). *Analisis Islamic Human Development Index I-HDI Di Kabupaten Bireuen*. IAIN Malikussalah.
- Muthmainnah, M. (2021). Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan. *Journal Of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 4(1).
- Rahmalia, S., Ariusni, A., & Triani, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i1.5345>
- Rukiah, R., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2019). Islamic Human Development Index di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqhasid Syariah). *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18(2).
- Shalahuddin, H. (2023). Analisis APBD Perspektif Islamic Human Development Index Kota Bogor Tahun 2021. *Asy-Syirkah: Islamic Economic And Financial Journal*, 2(2).
- Shikoh, R., & Alias, N. (2014). Measuring the Un-Measurable: Towards Constructing an Index of Islamic Development. *ournal of Economics and Management*.
- Shikoh, R., & Alias, N. (2015). Refining the Islamic Human Development Index. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 36(4), 25–50.
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2).
- Yurniwati, Yonnedi, E., & Amin, Z. (2019). Measuring Islamic Human Development Index in West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(1), 45–59.